

■ Dr. Azyumardi Azra, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Kian Meluas, Penggunaan Simbol Agama

Kini marak berdiri partai-partai Islam. Apakah pendirian partai ini merupakan kebutuhan rakyat kita atau kebutuhan elit politik untuk memakai partai ini demi kepentingan mereka?

Saya kira lebih banyak merupakan kepentingan elit. Elit dalam pengertian tidak hanya elit politik, tetapi juga elit secara keseluruhan. Karena, kalau kita lihat sekarang yang terjun dalam politik tidak hanya elit politik saja tetapi juga elit yang lain, yakni elit intelektual misalnya. Jadi, pendirian partai politik saya kira lebih merupakan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Sesungguhnya massa kita, meskipun pendidikannya dikatakan meningkat namun kesadaran politik mereka masih rendah. Ini lebih terlihat lagi bahwa pata-partai itu lebih merupakan kepentingan elit politik. Bagi saya, tidak logis munculnya partai-partai baru yang sebetulnya secara "ideologis" mempunyai semangat yang sama.

Misalnya kalau dulu tahun 1955 NU bisa disatukan, tapi sekarang ini tidak bisa lagi. Di NU sekarang ada PKB, PNU, PKU yang sebetulnya secara politik apalagi secara keagamaan jelas tidak ada perbedaan. Kenapa secara politik sekarang ini ada empat partai dalam satu organisasi. Itu kan yang menjadi pertanyaan kita. Tentu saja mungkin di kalangan NU ada yang secara politik dan interest personal masih mempersoalkan atau tidak menerima Gus Dur seperti Abu Hasan dan Yusuf Hasyim. Pertentangan inilah yang pada dasarnya menjadi alasan mengapa di dalam

NU muncul partai lebih dari satu.

Fenomena yang sama dengan NU juga terjadi di kalangan Islam modernis, suatu kelompok Islam mengklaim dirinya sebagai pewaris Masyumi. Di sana ada PBB, Masyumi-nya Mawardi Noer, Partai Keadilan, PUI yang semuanya itu menyatakan diri sebagai pewaris Masyumi. Kenapa masing-masing harus mendirikan partai? Pertanyaan ini tidak bisa dijelaskan dalam perspektif teori politik aliran. Perlu penjelasan lain yang lebih dalam.

Apakah fenomena multi partai berarti mencerminkan kesadaran politik masyarakat kita sudah tinggi. Artinya partai itu dibuat memang untuk kebutuhan mereka sendiri?

Untuk tingkat massa paling bawah (grass roots) itu perlu diteliti lebih lanjut sebab menurut saya hal ini masih sebatas asumsi-asumsi saja. Tapi kesan saya, massa bukan menginginkan partai. Tapi, sekali lagi mendirikan partai itu lebih merupakan keinginan elit politik tadi. Jadi kalau ada kesadaran politik itu hanya pada tingkat elit. Saya kira, masyarakat Muslim tingkat awam itu tidak perlu partai partai politik. Bagi mereka, yang paling penting adalah masalah-masalah yang mereka hadapi sekarang ini bisa terpecahkan. Terutama masalah ekonomi, masalah tenaga kerja, atau pangan. Saya kira itu yang paling mereka rasakan. *Apa dampaknya kalau partai politik banyak bermunculan, namun di sisi lain kesadaran politik masyarakat masih rendah?*

Masyarakat akan terombang-ambing di dalam

pergolakan politik yang terjadi di tingkat elit. Karena massa juga kurang mempunyai kesadaran politik, maka saya kira mereka akan mudah dikendalikan oleh *money politics* (politik yang menggunakan uang sebagai alat). Dalam waktu yang akan datang, saya kira penggunaan uang sebagai daya tarik politik untuk mendapatkan suara dalam pemilu yang akan datang akan terjadi. Karena bagi masyarakat pada umumnya yang paling penting adalah bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Kalau dikasih uang sepuluh ribu sampai dua puluh ribu, mereka tidak akan lagi loyal pada satu partai tertentu. Karena loyalitas mereka itu sangat bisa diubah dengan pendekatan politik uang itu.

Orang sering mengamati bahayanya money politics, tapi di sisi lain ada bahaya lagi yaitu politisasi agama.

Jelas itu berbahaya sekali karena nanti akan terjadi *truth claim* (klaim-klaim kebenaran) dari partai-partai yang berbasiskan keagamaan atau berbasiskan umat Islam. Sebenarnya gejala seperti itu merupakan gejala universal dalam kehidupan politik. Sesuatu yang berbau agama adalah primordial, artinya bawaan manusia sejak lahir. Gejala ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, di negara-negara Barat yang dianggap sekular, gejala itu pun masih nampak. Sebut saja di Amerika misalnya agama sering juga digunakan di dalam kampanye politik kelompok tertentu.. Ini kan namanya memanfaatkan simbolisme agama sebagai perekat massa. Apalagi di Indonesia.

Saya kira secara universal kita semua bisa melihat bahwa agama sering dibawa ke dalam politik karena watak agama yang merupakan sisi primordial manusia tadi. Cuma persoalannya di dalam masyarakat kita penggunaan simbolisme agama sangat besar dibandingkan dengan yang lain. Jadi penggunaan agama di Indonesia lebih besar daripada di Amerika. Jadi, pada pemilu yang akan datang penggunaan simbolisme agama bagaimanapun sederhananya akan tetap ada. Misalnya orang pakai kerudung padahal biasanya dia tidak pakai kerudung. Lalu, masuk ke wilayah masyarakat yang beragama, maka ia pakai kerudung. Itu juga merupakan simbolisme agama

dalam tingkat yang paling kecil. Jadi menurut hemat saya dalam pemilu yang akan datang, penggunaan simbolisme agama akan meluas.

Karena ini sudah terlanjur dan nampaknya tidak bisa kita tarik lagi, untuk itu yang paling penting bagi kita adalah bagaimana agar konflik-konflik agama itu tidak meluas menjadi perang agama. Dalam hal ini nampaknya kita harus bercermin ke Barat.

Saya kira mungkin sudah waktunya bagi para ulama, pemikir dan juga para praktisi elit politik kita untuk membuat semacam kesepakatan-kesepakatan dasar tentang wilayah-wilayah mana saja dari agama yang tidak boleh digunakan untuk alat politik. Misalnya saja paling tidak ada dua bidang yang bisa dilihat. Yang pertama adalah bidang-bidang yang menyangkut esensi agama seperti ritual atau ibadah. Se-dapat mungkin hal-hal yang demikian ini jangan sampai digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik.

Misalnya, beberapa waktu yang lalu, untuk memperingati tragedi Semanggi, mahasiswa menggunakan ibadah dalam hal ini sholat *tarawih* untuk hal

Seharusnya,
pemimpin-pemimpin
partai politik kita mendewasakan
dan mendidik umat
dan jangan hanya mengikuti arus umat.
Kalau memang
arus umat maunya menggunakan
simbol-simbol keagamaan
secara eksplisit,
tugas para elit politik itu
harus memulai menyadarkan

yang tidak bisa kita lepaskan dan sangat terkait dengan motif-motif politik. Menurut saya, hal-hal seperti itu harus jelas; jangan hal-hal yang bersifat ritual dan keagamaan itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Kedua, hal-hal yang lebih bersifat sosial kemasyarakatan misalnya simbolisasi Megawati, penggunaan lambang Ka'bah, atau penggunaan bulan bintang. Itu kan bukan sesuatu yang esensial dalam Islam. Jadi mungkin diperlukan kesepakatan-kesepakatan seperti itu dan juga batas-batas yang perlu disepakati.

Menurut anda, bagaimana kira-kira bentuknya?

Seperti di Amerika. Itu kan negara sekuler. Pemerintah dan partai politik pada umumnya tidak boleh menggunakan simbol-simbol agama secara eksplisit. Jadi, gedung-gedung pemerintah atau publik di dalamnya tidak boleh diletakkan lambang-lambang agama seperti salib, lilin Yahudi atau bulan bintang karena semua itu asosiatif dengan agama tertentu. Meskipun demikian, ada nilai-nilai agama yang masuk dalam politik, tapi penampakkannya sangat substantif.

Misalnya, dalam beberapa pemilu belakangan ini, setiap calon presiden di Amerika selalu mengemukakan tema-tema mengenai *family-values* (nilai-nilai

keluarga). Tidak asing lagi bagi masyarakat Amerika *family-values* adalah paradigma Protestan mengenai kehidupan keluarga yang sakinah. Kalau ada orang berbicara *family values* di Amerika, maka yang dimaksud adalah *family values*-nya Protestan. Atau bahkan penggunaan ungkapan "*God bless you*". Itu juga dalam kerangka Protestan.

Ronald Reagan secara eksplisit pernah mengatakan dalam kampanyenya "Kita akan membangun Amerika seperti kota di atas puncak bukit". Itu adalah simbolisme Protestan dari kaum puritan yang hijrah dari Eropa ke Amerika. Ungkapan itu dipahami oleh orang Amerika sebagai ungkapan Protestan sebagaimana di Indonesia dengan ayat-ayat al-Qur'an. Jadi, model-model begitu yang perlu dirumuskan. Atau disepakati paling tidak supaya tidak terjadi perpecahan

Bagaimana ini bisa diterapkan dalam konteks negara kita di mana human politicsnya masih memiliki kesadaran yang rendah, sementara para elit dan pemimpin politik kita nampaknya masih menggunakan massa untuk kepentingan mereka sendiri?

Itulah masalahnya. Jadi, saya kira, kesadaran dan kedudukan politik masyarakat kita memang masih perlu ditingkatkan. Seharusnya, pemimpin-pemimpin partai politik kita mendevasakan dan mendidik umat dan jangan hanya mengikuti arus umat. Kalau memang arus umat maunya menggunakan simbol-simbol keagamaan secara eksplisit, tugas para elit politik itu harus memulai menyadarkan atau membe-



Muhammad Ali Pasha dari Mesir dengan utusan Perancis di abad 19.

Sumber: Leksikon Islam

rikan perspektif. Kalau perlu berani mengingatkan kepada umatnya bahwa formalisasi agama seperti itu sebaiknya harus segera dihindari.

Terus terang masyarakat kita ini tidak pernah mendapatkan pendidikan politik yang serius terarah dan sistematis seperti itu. Justru, umat malah hanya digunakan untuk memberikan suara dalam pemilu. Jadi, kesalahannya bukan pada umat, tetapi pada elit politik dan elit pemerintahan Orde Baru yang memang membiarkan massa seperti itu. Seperti yang disebut sebagai konsep *floating mass* (massa mengambang) yang pada dasarnya tidak memiliki visi dan persepsi politik yang jelas.

Ada sementara kalangan yang beranggapan bahwa pendirian partai politik adalah untuk mempercepat proses menuju ke arah demokratisasi. Apa komentar Anda?

Argumentasi itu memang ada benarnya. Bahwa berdirinya partai-partai politik menunjukkan bahwa demokratisasi sedang berjalan. Tapi dalam situasi sekarang dimana terjadi multifikasi krisis, maka jumlah partai yang sedemikian banyak itu kemudian menjadi *questionable*. Memang partai sangat dibutuhkan dalam proses demokratisasi, tapi dalam situasi sosial-ekonomi seperti sekarang ini apakah partai-partai yang sedemikian banyak itu akan lebih mengungkapkan kesadaran politik atau justru sebaliknya. Kita memerlukan partai tapi tidak sebanyak itu, paling tidak untuk situasi seperti sekarang.

Menurut Anda bagaimana seharusnya partai-partai agama menempatkan posisi agama dalam dirinya?

Di dalam partai agama, persepsi tentang hubungan antara Islam dengan politik itu kan bermacam-macam. Belum ada kesepakatan. Ada yang lebih melihat hubungan agama dengan politik itu lebih substansif seperti yang dilakukan oleh PKB. Jadi,



Salah satu Muktamar Partai NU di tahun 50-an

bagaimana nilai-nilai Islam substantif tersebut diekspresikan ke dalam badan politik misalnya demokrasi (*musyawarah*), keadilan sosial, toleransi, penghormatan, pluralisme serta nilai-nilai lainnya. Selain itu, juga ada partai-partai Islam yang menginginkan atau memahami hubungan Islam dan politik secara lebih literal. Misalnya, simbol-simbol Islam harus di eksplisitkan dan kalau perlu di wujudkan dalam bentuk kelembagaan.

Oleh karena itu, di kalangan partai-partai Islam ini akan ada tarik-menarik sejauhmana atau bagaimana bentuknya nilai-nilai Islam itu diekspresikan. Saya kira Partai Keadilan lebih menginginkan simbol-simbol Islam diekspresikan dibandingkan dengan PBB. PBB nampaknya lebih menekankan ekspresi simbol-simbol Islam secara lebih substantif. Jadi, ada juga perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin dan mungkin para pemikir politik dan elit politik juga perlu merumuskan model apa yang paling cocok untuk konteks Indonesia ini. **Sekarang ini, ada kekhawatiran apabila partai-partai Islam menang, maka yang akan diperjuangkan adalah berdirinya negara Islam?**

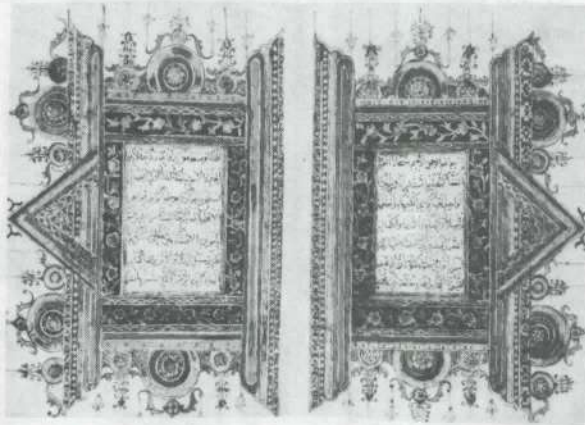
Jawaban saya di atas sebenarnya mengarah ke sana. Sebab kalau ada kelompok yang memahami Islam secara literal, maka kecenderungan ke arah itu menjadi tidak mustahil. Tapi saya melihat *mainstream*

elit politik Islam Indonesia lebih menekankan pada substansi. Contohnya adalah PKB dan PAN.

Tapi melihat fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, seperti dicabutnya asas tunggal Pancasila, sistem ekonomi Islam atau idiom-idiom lain yang lebih menampakkan formalisasi Islam, ini merupakan bukti bahwa kekuatan Islam politik akan bangkit lagi?

Saya tidak begitu optimis malah pesimis. Karena saya melihat, ada kelompok-kelompok yang menginginkan apa yang saya sebut sebagai Maududian (mengikuti model pemikiran politik Abu A'la al-Maududi, pemikir asal Pakistan – red.). Kemungkinan memang ada, tetapi tidak terlalu populer. Mungkin ini berkaitan langsung dengan nature Islam di Indonesia itu sendiri yang berbeda dengan Islam di Timur Tengah. Apalagi pada tiga dasa warsa terakhir ini atau bahkan sejak zaman Soekarno sudah ada konflik dan itu lebih tajam antara kelompok sekularis dengan kelompok Islam, sehingga kemudian kelompok sekularis tidak pernah menjadi kelompok yang solid di Indonesia. Berbeda dengan di Mesir atau di negara-negara lain.

Sebagaimana juga halnya dengan kelompok Islamis. Sehingga katakanlah karena kelompok sekularis tidak betul-betul menjadi kelompok yang solid yang akan mengancam kelompok Islamis, maka kemudian di kalangan umat Islam sendiri mereka tidak melihat kaum sekularis itu sangat berbahaya, sebagaimana terjadi di Mesir. Sehingga keadaan kaum sekularis itu menjadi *raison de etre* bagi munculnya satu kelompok Islamis. Selain itu di Timur Tengah rezimnya lebih opresif. Soeharto opresif atau represif, tetapi dibandingkan dengan Jamal Abdul Nasir atau Anwar Sadat levelnya masih di bawah sedikit. Ini yang menyebabkan kelompok Islamis di Timur



Sumber: Dok. Pribadi

Tengah semakin terkonsolidasi karena ideologi kaum sekular itu adalah ideologi sekularis.

Berbeda sekali dengan Indonesia, Pancasila yang pada umunya diterima sebagai ideologi yang *interpretable* dan *compatible* dengan agama. Karena itu, garis politik yang Maududian menjadi tidak populer. Jadi, walaupun ada

kelompok yang mau merubah negara Pancasila menjadi negara Islam saya kira itu sebagian kecil saja dan tidak perlu dikhawatirkan.

Seorang antropolog Amerika, Robert Heffner pernah menyatakan bahwa ditetapkannya asas tunggal merupakan kekalahan perjuangan kelompok Islamis, namun di sisi lain kekalahan ini justru menimbulkan side effect yang tidak kalah pentingnya yaitu kebangkitan Islam kultural?

Mungkin pada beberapa tahun lalu, Islam kultural memang luar biasa fenomenal. Namun pasca reformasi ini Islam politik lebih dominan. Pasca reformasi, Islam kultural mungkin masih ada tetapi tidak sedominan yang dulu. Memang alamnya sudah begitu berubah. Tapi tarik tambang antara kekuatan politik dan kultural dalam Islam itu masih terus terjadi, tidak hanya menjelang pemilu tetapi hingga pasca pemilu. Sebelum ada presiden yang betul-betul *legitimate*, kekuatan politik Islam akan terus lebih dominan dari pada kultural Islam.

Sebetulnya mana yang lebih penting di antara keduanya?

Dua-duanya sebetulnya penting. Islam kultural juga harus ditempuh untuk mewujudkan masyarakat madani. Menurut saya, perjuangan membangun umat tidak akan efektif apabila hanya melalui political Islam saja.

Bagaimana dengan kesempatan partai-partai politik yang berasaskan agama Islam dalam

pemilu yang akan datang?

Saya tidak terlalu optimis dengan partai-partai yang berasaskan agama. Di tahun 1955 dulu memang partai Islam yang lumayan. Namun sangat boleh jadi pada masa sekarang, partai Islam tidak akan memperoleh apa-apa, melihat begitu banyaknya dan begitu tingginya tingkat konflik di antara mereka. Untuk mendapatkan suara yang signifikan menurut saya mereka harus melakukan *merger* (bergabung). Tapi *merger* ini mungkin hanya bisa dilakukan oleh partai politik yang memang memiliki satu *platform*. Tapi sampai sekarang ini *kan* belum ada yang melakukan. Memang sudah ada kesepakatan-kesepakatan di antara mereka namun ini juga belum jelas.

Jadi, menurut saya banyaknya partai-partai Islam itu bukan berarti bahwa umat Islam akan menang dalam pemilu. Lebih-lebih kalau mereka tidak melakukan koalisi di antara mereka sendiri.

Ada satu hal yang sangat menarik, dan ini yang banyak diduga. Yaitu, berkenaan dengan munculnya konflik lama antara kelompok Islam modernis dan kelompok Islam tradisional yang kembali muncul sekarang.

Saya kira kemungkinannya sangat besar. Sebenarnya itu merupakan warisan zaman Orde Baru di mana kaum tradisional mengalami proses marginalisasi sehingga bisa dipahami mengapa kemudian kaum tradisional berusaha agar pengalaman pahit masa Orde Baru itu tidak boleh terjadi lagi.

menurut saya

banyaknya partai-partai Islam

itu bukan berarti bahwa
umat Islam akan menang
dalam pemilu.

Lebih-lebih kalau mereka
tidak melakukan koalisi
di antara mereka sendiri.

Oleh karena itu kaum tradisional saya kira dalam rangka mencapai itu akan menjalin koalisi dengan kelompok-kelompok yang akan bisa mendatangkan keuntungan bersama.

Dalam kerangka demikian bisa kita pahami misalnya PKB sebagai wakil bagian terbesar kaum tradisional berusaha dekat dengan Megawati. Gus Dur dan Mega atau PKB dan PDI Perjuangan hubungannya sangat kuat karena mereka menghadapi katakankalah *common enemy*, yakni kaum modernis yang sekarang diwakili oleh PAN, Golkar atau partai-partai lain yang didalamnya banyak sekali didominasi kaum modernis. Ini satu hal yang riil jadi per-gulatan politik antara kaum tradisional dan kaum modernis akan mewarnai masa-masa mendatang.

Ini akan mencapai titik equilibrium atau akan memuncak pada menang kalah?

Kalau sekarang ini, khususnya dari Gus Dur, kelihatannya cenderung *zero-sum game* (permainan menang-kalah, *red.*). Misalnya dalam merencanakan dialog segi empat, Gus Dur tidak melibatkan tokoh modernis. Tapi saya tidak tahu kalau kemudian Gus Dur juga akan melakukan kompromi-kompromi politik dengan tokoh-tokoh modernis. Tapi berdasarkan keyakinan saya lihat alur politiknya kayak *now* atau *never*. *Zero-sum game* ini akan bisa berubah kalau kelompok modernis sendiri juga bersedia memberikan konsesi-konsesi yang bisa diterima oleh kaum tradisional misalnya pembagian kekuasaan (*power-sharing*) tapi sampai sekarang kan belum ada tanda-tanda menuju ke arah itu. Kalau menurut saya sebagus-bagusnya solusi bagi pertarungan kaum tradisional dan modernis adalah *win-win solution*. Artinya di antara mereka diharapkan saling mengisi kekurangan masing-masing.

Apakah itu akan terjadi ?

Bisa kalau masing-masing punya *political will*. Saya melihat bahwa Cak Nur itu potensial untuk menjembatani antara kaum tradisional dan kaum modernis. Cuma Cak Nur sendiri kelihatannya agak sungkan kepada Amin Rais atau Gus Dur.